



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2025

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN BATU BARA**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 terhadap pernyataan kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara yang telah direncanakan.

LKjIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Gampus Laut, 26 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Kabupaten Batu Bara

**RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T, M. SI**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19791213 200804 1001**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	5
1.4. Sistematika .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1. Perencanaan Strategis .....	7
2.2. Perjanjian Kinerja 2024 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>11</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	11
1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten.....	15
2. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten .....	22
3. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten ...	29
4. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi .....	33
5. Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik .....	41
6. Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten .....	44
7. Nilai evaluasi AKIP .....	49
3.2. Realisasi Anggaran .....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan.....	59
<b>LAMPIRAN</b> Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Strategis Jangka Menengah .....	7
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	9
Tabel 2.3	Program Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 .....	10
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.....	12
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 .....	13
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tiap Tahun.....	14
Tabel 3.4	Analisis Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten .....	15
Tabel 3.5	Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kondisi (Km) Tahun 2023-2025 .....	16
Tabel 3.6	Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Jenis Permukaan (Km) Tahun 2023-2025 .....	17
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten .....	17
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Sumber Daya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten .....	18
Tabel 3.9	Pekerjaan Fisik yang mendukung Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten .....	19
Tabel 3.10	Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten .....	22
Tabel 3.11	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025 .....	24



Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten ....	25
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Sumber Daya Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten .....	26
Tabel 3.14	Pekerjaan Fisik yang mendukung Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten .....	28
Tabel 3.15	Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten .....	29
Tabel 3.16	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025 .....	30
Tabel 3.17	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten .....	31
Tabel 3.18	Analisis Efisiensi Sumber Daya Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten .....	32
Tabel 3.19	Analisis Capaian Indikator Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi .....	34
Tabel 3.20	Perbandingan Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025 .....	35



Tabel 3.21 Program dan Kegiatan Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi .....	35
Tabel 3.22 Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi .....	38
Tabel 3.23 Pekerjaan Fisik yang mendukung Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi .....	39
Tabel 3.24 Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik .....	41
Tabel 3.25 Program dan Kegiatan Indikator Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik.....	42
Tabel 3.26 Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik .....	43
Tabel 3.27 Pekerjaan Fisik yang mendukung Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik.....	44
Tabel 3.28 Analisis Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten .....	45
Tabel 3.29 Program dan Kegiatan Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten .....	45
Tabel 3.30 Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten .....	48
Tabel 3.31 Analisis Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP .....	49
Tabel 3.32 Nilai Evaluasi AKIP Dinas PUTR Tahun 2022-2025 .....	50
Tabel 3.33 Program dan Kegiatan Indikator Nilai Evaluasi AKIP .....	50
Tabel 3.34 Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten.....	55
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 .....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara .....	4
Gambar 3.1	Peningkatan Jalan Dusun VII menuju Balai Desa Perkebunan Lima Puluh Kec. Lima Puluh .....	20
Gambar 3.2	Peningkatan Jalan Dusun X Pasar I Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh .....	21
Gambar 3.3	Peningkatan Jalan Dusun VI Mangkai Lama Kec. Lima Puluh ..	21
Gambar 3.4	Peningkatan Jalan Dusun VI menuju Dusun XII Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh .....	21
Gambar 3.5	Perluasan Jaringan Perpipaan Air Minum Kec. Sei Balai .....	28
Gambar 3.6	Pembuatan Sumur Bor di Batalyon Kompi 126 Kala Cakti Kec. Sei Balai .....	28
Gambar 3.7	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sukaramai Kec. Sei Balai .....	39
Gambar 3.8	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Serba Jadi Kec. Datuk Tanah Datar .....	40
Gambar 3.9	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kwala Sikasim Kec. Sei Balai .....	40
Gambar 3.10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kwala Gunung Kec. Datuk Lima Puluh .....	40
Gambar 3.11	Pembangunan Drainase di Dusun VII Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh .....	41



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja utama sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

## **1.2. Tugas dan Fungsi**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara terdiri dari:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum, tata ruang dan tugas pembantuan.

b) Sekretariat

Dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan yang membawahi sub bagian, yaitu:

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- Sub Bagian Keuangan dan Program.



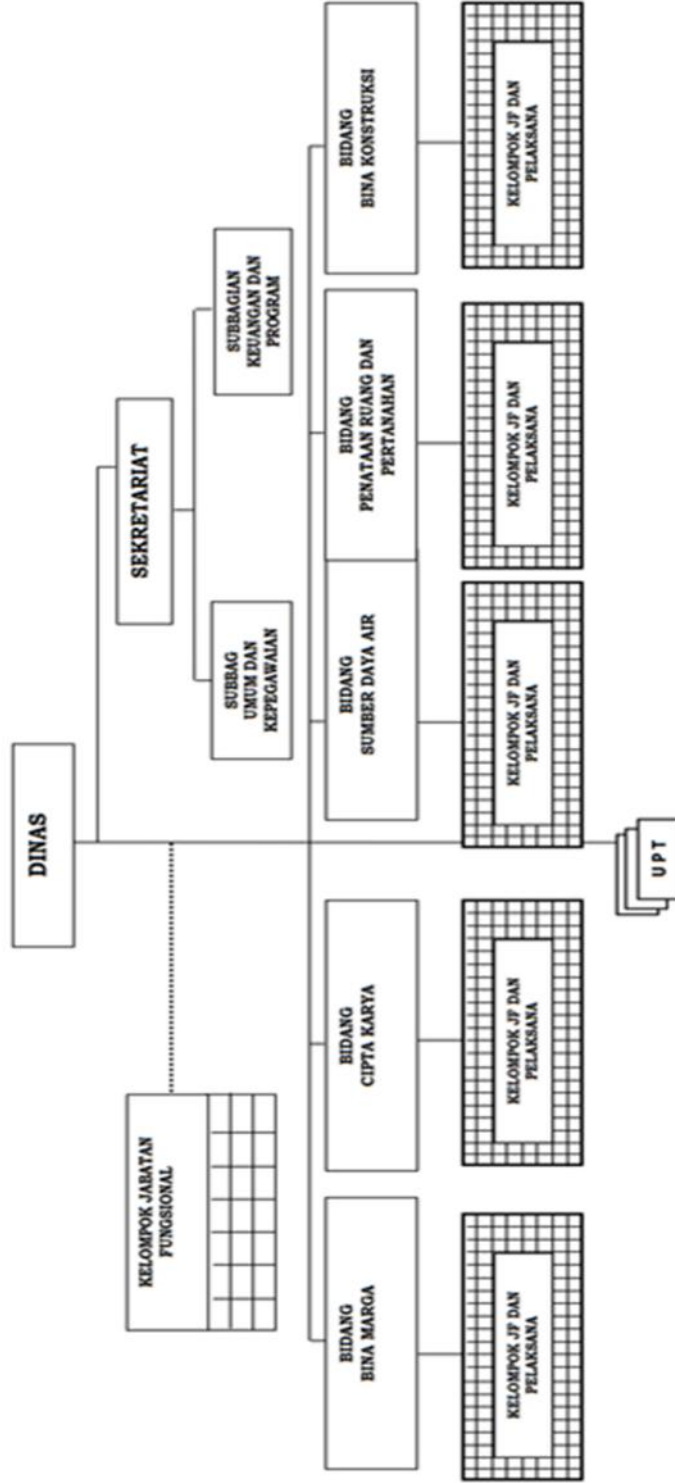
- c) Kepala Bidang Bina Marga  
Dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang bina marga.
- d) Kepala Bidang Cipta Karya  
Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata yang meliputi operasional perencanaan, penataan bangunan kota dan kawasan khusus dan prasarana lingkungan permukiman bidang air bersih, drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan.
- e) Kepala Bidang Sumber Daya Air  
Dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan menyusun rencana teknis sumber daya air.
- f) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan  
Dipimpin oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan menyusun rencana teknis tata ruang dan pertanahan.
- g) Kepala Bidang Bina Kontruksi  
Dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan dibidang jasa konstruksi, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.



# STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUTR KAB. BATU BARA

BERDASAKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO. 7 TAHUN 2016

PERBUB NO. 23 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BATU BARA



Activate Windows

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara

### **1.3. Landasan Hukum**

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 68 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara.



## 1.4. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

#### 3.2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

**BAB II****PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**2.1. Perencanaan Strategis**

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Rencana Strategis Jangka Menengah

Sasaran/ Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap jalan yang nyaman dan aman						
<i>Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten</i>	61,00%	62,25%	63,50%	64,75%	66,16%	67,57%
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi						
<i>Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten</i>	91,44%	91,45%	91,54%	91,66%	91,81%	91,90%
<i>Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses</i>	88,79%	88,82%	88,85%	88,88%	88,91%	88,93%



Sasaran/ Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten</i>						
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem irigasi						
<i>Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi</i>	63,30%	65,74%	67,37%	68,99%	71,84%	74,69%
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem drainase						
<i>Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik</i>	88,50%	89,00%	93,00%	95,00%	95,50%	96,00%
5. Terkendalinya penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan						
<i>Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
<i>Nilai Evaluasi AKIP</i>	73,50 (BB)	74,00 (BB)	74,50 (BB)	75,00 (BB)	76,00 (BB)	77,00 (BB)

## 2.2. Perjanjian Kinerja 2025

Pernyataan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 disebut Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2025. Yang mana didalamnya disusun dan ditetapkan indikator kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara kepada Bupati Batu Bara, antara pejabat eselon III kepada Kepala Dinas, dan antara pejabat eselon IV kepada Pejabat eselon III di atasnya.



Adapun perencanaan kinerja Kepala Dinas kepada Bupati Batu Bara pada pernyataan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten  
Batu Bara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Jalan Yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	60
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persen	91,44
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten	Persen	88,74
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	72,05
4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	92,70
5.	Terkendalinya Penataan Ruang, Infrastruktur dan Lingkungan	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Persen	100
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB (76,00)



**Tabel 2.3**  
**Program Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Pagu Anggaran (Rp Ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Jalan Yang Nyaman dan Aman	Program Penyelenggaraan Jalan	54.040.696.838
2.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	489.922.910
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.600.000
3.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.134.419.579
4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.105.043.460
5.	Terkendalinya Penataan Ruang, Infrastruktur dan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	154.531.244
		Program Penataan Bangunan Gedung	11.938.894.764
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	380.000.000
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.662.266.609
<b>JUMLAH</b>			<b>85.915.375.404</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara diperoleh berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025. Kesimpulan dari hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tersebut dibuat berdasarkan capaian rata-rata dari seluruh capaian indikator kinerja sasaran kedalam suatu predikat nilai. Predikat nilai capaian kinerja dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>
< 100%	Tidak Mencapai Target
= 100%	Sesuai Target
> 100%	Melampaui Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya suatu kinerja yang diharapkan, dan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kemudian perlu dianalisa efisiensi penggunaan sumber daya untuk tiap Indikator Kinerja Utama. Adapun rumus perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya atas kinerja yang dihasilkan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$  : alokasi anggaran RO i

$RARO_i$  : realisasi anggaran RO i

$CRO_i$  : capaian RO i

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara berdasarkan Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap jalan yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	60	60	100
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten	91,44	91,44	100
		Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah	88,74	88,79	100,05



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tangga Diseluruh Kabupaten			
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	72,05	72,05	100
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	92,70	92,70	100
5	Terkendalinya penataan ruang, infrastuktur dan lingkungan	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100	100	100
6	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	BB (76,00)	BB (76,00)	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100</b>

Dari pengukuran terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2025 sebagaimana diatas menunjukkan bahwa:

- J Indikator kinerja yang capaiannya melebihi target 100% adalah 1 (satu) indikator kinerja;
- J Indikator kinerja yang capaian kinerjanya memenuhi target 100% adalah 6 (enam) indikator kinerja; dan
- J Indikator kinerja yang capaian kinerja tidak mencapai target 100% adalah 0 (nol) indikator kinerja.

Dan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, maka nilai-nilai diatas dimasukan kedalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

Sasaran	Jumlah IKU	Tingkat Pencapaian		
		Melampaui	Sesuai Target	Tidak Mencapai



		target (>100%)		(100%)		Target (<100%)	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1	1	0	0	1	100	0	0
Sasaran 2	2	1	50	1	50	0	0
Sasaran 3	1	0	0	1	100	0	0
Sasaran 4	1	0	0	1	100	0	0
Sasaran 5	1	0	0	1	100	0	0
Sasaran 6	1	0	0	1	100	0	0
Jumlah	7	1	14,3	6	85,7	0	0

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa tidak ada sasaran yang pencapaiannya dibawah 100% yang artinya tidak terdapat kendala atau permasalahan berarti dalam upaya pencapaian target sasaran perangkat daerah.

Adapun perbandingan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tiap Tahun

NO.	CAPAIAN KINERJA SASARAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melebihi Target	25,0%	12,5%	50%	28,6%	14,3%
2	Sesuai Target	12,5%	62,5%	25%	42,8%	85,7%
3	Tidak Mencapai Target	62,5%	25%	25%	28,6%	0%

Analisis pencapaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama untuk setiap pernyataan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

## 1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten}} \times 100$$

Indikator kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap jalan yang nyaman dan aman, itu dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Analisis Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2025	REALISASI 2025	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap jalan yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	60	60	100

Berdasarkan hasil pengukuran bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara bahwa pada Tahun 2025 panjang jalan Kabupaten Batu Bara dalam kondisi mantap adalah 60% atau sepanjang 383,489 Km dari 639,079 Km panjang keseluruhan jalan Kabupaten Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara Nomor 227/PUPR/2017. Realisasi tersebut masih dibawah realisasi jalan mantap pada jalan nasional dan jalan provinsi Sumatera Utara yang mana berdasarkan *data.pu.go.id* pada tahun 2024 jalan mantap pada Provinsi Sumatera Utara sudah sepanjang 2.348,31 Km atau mencapai 78,13% sedangkan jalan nasional yang telah dikategorikan mantap sudah mencapai 44.834,54 km atau sebesar 94,2%.

Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya panjang jalan kabupaten Batu Bara dalam kondisi mantap terjadi peningkatan, walaupun meningkat tidak signifikan, yaitu hanya meningkat sebanyak 3,3 Km. Itu dikarenakan adanya penurunan panjang jalan dalam kondisi sedang, walaupun panjang dalam kondisi baik bertambah signifikan.

Kemudian untuk mengetahui capaian kinerja indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025, maka perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Yang mana jika target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah 60%, maka capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025 adalah 100% atau tercapai sesuai target.

Kemudian untuk mengukur capaian kinerja Renstra perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh dengan target kinerja pada tahun diakhir periode Renstra tahun 2025-2029. Sehingga jika target Renstra pada tahun 2029 untuk indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah 66,16%, maka capaian kinerja Renstra untuk Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2025 masih sebesar 90,68%.

Berikut ini perbandingan kondisi jalan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kondisi (Km) Tahun 2023-2025

No	Kondisi Jalan	2023	2024	2025
1	Baik	228,081	255,313	326,108
2	Sedang	137,004	124,818	57,381
3	Rusak Ringan	42,909	40,209	14,930
4	Rusak Berat	231,045	218,739	240,660
	Jumlah	639,079	639,079	639,079

Sumber Data: Bidang Bina Marga 2025



Tabel 3.6  
Jalan Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Jenis Permukaan (Km)  
Tahun 2023-2025

No	Jenis Permukaan	2023	2024	2025
1	Rigid	82,308	85,308	71,559
2	Hotmix	359,332	367,252	392,488
3	Aspal	14,41	14,41	2,200
4	Kerikil	157,586	146,316	40,918
5	Tanah	25,443	25,793	131,914
	Jumlah	639,079	639,079	639,079

Sumber Data: Bidang Bina Marga 2025

Pencapaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten didukung dengan adanya dukungan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun realisasi kinerja dan anggaran program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Program dan Kegiatan Indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRAM PENYELENG GARAAN JALAN	54.040.696	52.012.999	96,25	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Jalan Dalam Kondisi Baik menjadi 51,03%
1.	Penyelenggar aan Jalan Kabupaten/ Kota	54.040.696	52.012.999	96,25	Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan sepanjang 15 Km
1)	Rekonstruksi Jalan	33.426.272	33.215.159	99,37	Terekonstruksin ya jalan 10 Km
2)	Pemeliharaan rutin jembatan	1.530.869	1.178.859	77,01	Terpeliharanya 5 Jembatan scara rutin



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3)	Rehabilitasi jembatan	3.014.184	3.014.184	100,00	Terlunasinya hutang pekerjaan tahun 2023 pada sub kegiatan ini
4)	Pembangunan Jembatan	8.010.000	7.951.897	99,27	Terlaksananya Pembangunan 2 Jembatan
5)	Survey kondisi jalan/ jembatan	745.000	741.110.000	99,48	639 Km Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi
6)	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.314.371	5.911.789	80,82	Terpeliharanya 5 Km jalan secara rutin
	JUMLAH	54.040.696	52.012.999	96,25	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten terhadap realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8

## Analisis Efisiensi Sumber Daya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap jalan yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	60	60	100	54.040	52.012	96,25	<b>0,99</b>

Dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja tersebut dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi kelengkapan database seperti data trotoar, drainase, LPJU, dan jembatan;
2. Mengupdate kondisi jalan setiap tahunnya;
3. Memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan jalan dan jembatan yang termasuk dalam skala prioritas pembangunan yang menunjang pencapaian target tujuan dan sasaran;
4. Menyusun penetapan status jalan sesuai kondisi terkini.

Keberhasilan pencapaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten tidak terlepas dari adanya alokasi anggaran dan output nyata dari pekerjaan fisik pada program dan kegiatan, adapun itu antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.9

Pekerjaan Fisik yang mendukung Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

No	Nama Pekerjaan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Jalan Dusun VII menuju Balai Desa Perkebunan Lima Puluh	Lima Puluh
2.	Peningkatan Jalan Dusun X Pasar I Desa Simpang Gambus	Lima Puluh
3.	Peningkatan Jalan Dusun VI Mangkai Lama	Lima Puluh
4.	Peningkatan Jalan Dusun VI menuju Dusun XII Desa Simpang Gambus	Lima Puluh
5.	Pembangunan Pengerasan Akses Jalan Masuk ke Markas Komando Yonif 126/KC di Desa Perjuangan	Sei Balai
6.	Peningkatan Ruas Jalan Pelompatan Kec. Sei Suka (DBH Sawit)	Sei Suka
7.	Peningkatan Ruas Jalan Desa Perkebunan Sei Bejangkar	Sei Balai
8.	Peningkatan Ruas Jalan dari Kec. Sei Balai ke Kec. Nibung Hangus	Nibung Hangus
9.	Pembuatan Turap di Desa Guntung (dekat TPI)	Lima Puluh Pesisir
10.	Peningkatan Ruas Jalan Sei Bejangkar menuju Dusun Teratak	Sei Balai
11.	Peningkatan Jalan dari Desa Bagan Baru Menuju Desa Kapal Merah	Nibung Hangus

No	Nama Pekerjaan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
12.	Peningkatan Ruas Jalan di Desa Suka Ramai	Sei Balai
13.	Peningkatan Ruas Jalan Bulan-bulan menuju Gunung Bandung	Lima Puluh Pesisir
14.	Peningkatan Ruas Jalan dari Dusun V Simpang Dolok menuju Dusun II Desa Kuala Gunung	Datuk Lima Puluh
15.	Peningkatan Jalan Desa Perjuangan	Sei Balai
16.	Peningkatan Jalan Desa Perkebunan Sei Bejangkar	Sei Balai
17.	Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Desa Gunung Rante menuju Desa Sumber Tani (Pardomuan)	Talawi
18.	Peningkatan Jalan Lintas Gunung Bandung menuju Titi Merah	Lima Puluh Pesisir
19.	Peningkatan Jalan Dusun VI Sei Bejangkar	Sei Balai
20.	Peningkatan Jalan Lintas Desa Tanah Itam Ilir dari dusun XII Desa Simpang Gambus menuju Porwodadi	Lima Puluh



Gambar 3.1. Peningkatan Jalan Dusun VII menuju Balai Desa Perkebunan Lima Puluh Kec. Lima Puluh



Gambar 3.2. Peningkatan Jalan Dusun X Pasar I Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh



Gambar 3.3 Peningkatan Jalan Dusun VI Mangkai Lama Kec. Lima Puluh



Gambar 3.4 Peningkatan Jalan Dusun VI menuju Dusun XII Desa Simpang Gambus Kec. Lima Puluh

## 2. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten

Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten bersangkutan}} \times 100$$

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi diukur dari indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10

Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	Realisasi 2025	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan	Persen	91,44	91,44	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	Realisasi 2025	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten				

Berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 dari bidang Cipta Karya diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Batu Bara adalah sebanyak 100.146 rumah atau sebesar 91,44% dari total proyeksi rumah tangga di Kabupaten Batu Bara yang diperkirakan pada Tahun 2025 sebanyak 109.817 rumah.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Batu Bara meningkat sekitar 4.576 rumah tangga atau sekitar 4,16%

Kemudian untuk mengetahui capaian kinerja indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten tahun 2025, maka perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Yang mana jika target Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah 91,44%, maka capaian indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten tahun 2025 adalah 100% atau tercapai sesuai target.

Kemudian untuk mengukur capaian kinerja Renstra perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh dengan target kinerja pada tahun terakhir pada periode Renstra tahun 2025-2029. Sehingga jika target Renstra pada tahun 2029 adalah 91,81, maka capaian Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten adalah sebesar 99,59%.

Berikut ini perbandingan kondisi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.11

Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum JP dan BJP	78,85%	85,21%	85,91%	86,23%	91,44%

Sumber Data: Bidang Cipta Karya 2025

Pencapaian kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten didukung dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan. Adapun realisasi kinerja dan anggaran program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Program dan Kegiatan Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan



Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah  
Tangga Di Seluruh Kabupaten

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	489.922	477.734	97,51	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Yang Diakses Masyarakat menjadi 91,44%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pemenuhan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	489.922	477.734	97,51	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Akses Air Minum melalui SPAM kepada Masyarakat 36 rumah tangga
1)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10.050	10.050	100,00	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 dokumen
2)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan	200.000	190.872	95,44	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perpipaan				Jaringan Perpipaan 1 Unit
3)	Pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) jaringan perpipaan	53.446	53.446	100,0 0	Terlunasinya hutang pekerjaan tahun 2023 pada sub kegiatan ini
4)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	112.426	111.064	98,79	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1 unit
5)	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	114.000	112.301	98,51	Terlaksananya Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 20 SR
	JUMLAH	489.922	477.734	97,51	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber daya atas kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten terhadap realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13

Analisis Efisiensi Sumber Daya Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di



## Seluruh Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten	91,44	91,44	100	489.922	477.734	97,51	<b>0,99</b>

Dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja tersebut dimasa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi database capaian air minum Kabupaten Batu Bara *by name by address*;
2. Mengupdate kondisi SPAM kabupaten setiap tahunnya;
3. Memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan SPAM yang termasuk dalam skala prioritas yang menunjang pencapaian target tujuan dan sasaran.

Keberhasilan pencapaian kinerja persentase rumah dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak tidak terlepas dari adanya alokasi anggaran dan *output* pekerjaan fisik pada Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara. Adapun pekerjaan fisik dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14

Pekerjaan Fisik yang mendukung Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten

No	Nama Pekerjaan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Perluasan Jaringan Perpipaan Air Minum Kec. Sei Balai	Sei Balai
2.	Pembuatan Sumur Bor di Batalyon Kompi 126 Kala Cakti Kec. Sei Balai	Sei Balai



Gambar 3.5 Perluasan Jaringan Perpipaan Air Minum Kec. Sei Balai



Gambar 3.6 Pembuatan Sumur Bor di Batalyon Kompi 126 Kala Cakti Kec. Sei Balai

### 3. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten

Indikator Kinerja Utama Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \text{jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT} + \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100$$

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi juga diukur dari indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15

Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	Realisasi 2025	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga	Persen	88,74	88,79	100,05



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	Realisasi 2025	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Diseluruh Kabupaten				

Berdasarkan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum tahun 2025 dari bidang Cipta Karya diperoleh bahwa Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk ditambah jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT ditambah jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD adalah sebanyak 97.504 rumah atau sebesar 88,79% dari total proyeksi rumah di Kabupaten Batu Bara yang diperkirakan sebanyak 109.817 rumah.

Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan target 88,74% yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten Batu Bara tahun 2025 adalah sebesar 100,05% atau melebihi target.

Kemudian untuk mengukur capaian kinerja Renstra perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh dengan target kinerja pada tahun terakhir periode Renstra tahun 2025-2029. Sehingga jika target Renstra pada tahun 2029 adalah 88,91%, maka capaian Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten adalah 99,86%.

Berikut ini perbandingan kondisi Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.16

Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga



## Diseluruh Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan SPALD	76,64%	87,79%	88,23%	88,73%	88,79%

Sumber Data: Bidang Cipta Karya 2025

Pada tahun ini capaian kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten kurang didukung dengan anggaran program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Program dan Kegiatan Indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.600	9.600	100	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Yang Diakses Masyarakat menjadi 88,79%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	9.600	9.600	100	Terlaksananya Pengolahan Air Limbah melalui SPALD kepada Masyarakat : Nihil



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kabupaten/Kot a				
2)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	9.600	9.600	100	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1 Dokumen
	JUMLAH	9.600	9.600	100	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber daya pada kinerja Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.18

Analisis Efisiensi Sumber Daya Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisien si
			Targe t	Reali sasi	Capa ian (%)	Target (Rp Ribu)	Realis asi (Rp Ribu)	Capa ian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatny a akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatka n Akses Layanan Pengolahan	88,74	88,79	100,05	9.600	9.600	100	<b>0,99</b>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten							

Untuk meningkatkan capaian kinerja persentase Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten dimasa mendatang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melengkapi database capaian air limbah Kabupaten Batu Bara *by name by address*;
2. Mengupdate kondisi SPALD setiap tahunnya;
3. Komitmen untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan SPALD;
4. Memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan yang termasuk dalam skala prioritas yang menunjang pencapaian target tujuan dan sasaran OPD.

#### 4. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja Utama Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} \times 100$$

Indikator kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi digunakan untuk

mengukur pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem irigasi, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.19  
Analisis Capaian Indikator Kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	Realisasi 2025	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	72,05	72,05	100

Berdasarkan laporan dari bidang Sumber Daya Air (SDA) bahwa luas irigasi kewenangan Kabupaten Batu Bara yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan pelihara di tahun 2025 adalah 3.246 Ha atau sebesar 72,05 % dari total luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batu Bara yaitu seluas 4.505,118 Ha.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 64,38%, maka Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,67%.

Kemudian untuk mengetahui capaian kinerja indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi tahun 2025, maka perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Yang mana jika target Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah 72,05%, maka capaian indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi tahun 2025 adalah 100% atau tercapai sesuai target.

Kemudian untuk mengukur capaian kinerja Renstra perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh dengan target kinerja pada tahun diakhir periode Renstra tahun 2025-2029. Sehingga jika target Renstra pada tahun 2029 untuk indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi adalah 71,84%, maka capaian kinerja Renstra untuk Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi pada tahun 2025 sudah melampaui target 100%.

Adapun perbandingan capaian Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi kabupaten Batu Bara dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.20

Perbandingan Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	77,45%	77,45%	70,04%	64,38%	72,05%

Sumber Data : Bidang Sumber Daya Air (SDA)

Pencapaian kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi didukung dengan adanya dukungan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun realisasi kinerja dan anggaran program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.21

Program dan Kegiatan Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.134.419	5.102.383	99,38	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sistem Irigasi Dalam Kondisi Baik menjadi 63,30%
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.764.969	1.737.811	98,46	Terlaksananya Pembanguna, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Bangunan SDA Dalam Daerah sepanjang 4,75 Km
1)	Normalisasi/ Restorasi Sungai	1.078.151	1.078.151	99,35	Terlaksananya Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi 4,7 Km
2)	Pembangun an bangunan perkuatan tebing	686.818	686.818	97,07	Terlaksananya Panjang Bangunan Perkuatan Tebing Yang Dibangun 0,05 Km
2.	Pengemban gan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	3.369.450	3.364.572	99,86	Terlaksananya Pembanguna, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				Irigasi Kewenangan Daerah sepanjang 10,5 Km
1)	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	672.000	668.738	99,51	Meningkatnya Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan 0,4 Km
2)	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	500.000	499.659	99,93	Terehabilitasi Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi 0,0,3 Km
3)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.185.000	2.183.774	99,94	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 9,8 Km
4)	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	12.450	12.400	99,60	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Rawa yang Disusun 1 Dokumen
	Jumlah	5.134.419	5.102.383	99,38	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi terhadap realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.22

Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	63,30	63,30	100	5.134.419	5.102.383	99,37	<b>0,99</b>

Adapun untuk peningkatan kinerja dimaksud dimasa mendatang perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupdate database kondisi sistem irigasi setiap tahunnya;
2. Memprioritaskan pelaksanaan pekerjaan yang termasuk dalam skala prioritas yang menunjang pencapaian target tujuan dan sasaran OPD;

Keberhasilan pencapaian kinerja Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi tidak terlepas dari adanya alokasi anggaran dan output nyata dari pekerjaan

fisik pada program dan kegiatan. Adapun pekerjaan fisik dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23

Pekerjaan Fisik yang mendukung Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

No	Nama Pekerjaan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sukaramai Kec. Sei Balai	Sei Balai
2.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Serba Jadi Kec. Datuk Tanah Datar	Datuk Tanah Datar
3.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sei Muka Kec. Datuk Tanah Datar	Datuk Tanah Datar
4.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kwala Sikasim Kec. Sei Balai	Sei Balai
5.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kwala Gunung Kec. Datuk Lima Puluh	Datuk Lima Puluh



Gambar 3.7. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Sukaramai Kec. Sei Balai



Gambar 3.8. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Serba Jadi Kec. Datuk Tanah Datar



Gambar 3.9. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kwala Sikasim Kec. Sei Balai



Gambar 3.10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kwala Gunung Kec. Datuk Lima Puluh

## 5. Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Utama Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Panjang drainase kewenangan Kabupaten yang berfungsi baik}}{\text{Panjang drainase keseluruhan di wilayah Kabupaten}} \times 100$$

Indikator kinerja Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem drainase, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.24

Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	92,70	92,70	100

Berdasarkan laporan akhir penyusunan database drainase Kabupaten Batu Bara tahun 2025 dari bidang Cipta Karya bahwa jumlah panjang drainase pada jalan kabupaten yang terdata adalah 71,65 Km yang mana panjang drainase yang berfungsi dengan baik sepanjang 66,42 Km atau sebesar 92,7%.

Jika realisasi Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka capaian indikator Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik tahun 2025 100% atau tercapai sesuai target.

Kemudian untuk mengukur capaian kinerja Renstra perlu dibandingkan realisasi kinerja yang diperoleh dengan target kinerja pada tahun terakhir pada periode Renstra tahun 2025-2029. Sehingga jika target Renstra pada tahun 2029 adalah 95,50, maka capaian Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik adalah sebesar 97,06%.

Pencapaian kinerja Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik didukung dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan. Adapun realisasi kinerja dan anggaran program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25  
Program dan Kegiatan Indikator Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.105.043	1.075.071	97,29	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Sistem Drainase Perkotaan Dalam Kondisi Baik menjadi 92,7%
1.	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.105.043	1.075.071	97,29	Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Drainase Perkotaan sepanjang 1 Km
1)	Peningkatan sistem drainase perkotaan	412.000	383.115	92,99	Meningkatnya 1 sistem drainase perkotaan



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	112.404	111.506	99,20	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 1 Dokumen
3)	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	580.638	580.449.500,00	99,97	Beroperasi dan Terpeliharanya 5 Sistem Drainase Perkotaan
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.105.043</b>	<b>1.075.071</b>	<b>97,29</b>	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber daya atas kinerja Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik terhadap realisasi anggaran program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.26

Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	92,7	92,7	100	1.105	1.075	97,29	<b>0,99</b>

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik tidak terlepas dari adanya alokasi anggaran dan

output pekerjaan fisik pada program dan kegiatan. Adapun pekerjaan fisik dimaksud dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.27

Pekerjaan Fisik yang mendukung Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik

No	Nama Pekerjaan	Lokasi
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan Drainase di Dusun VII Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh	Datuk Lima Puluh



Gambar 3.11 Pembangunan Drainase di Dusun VII Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh

## 6. Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten

Indikator Kinerja Utama Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten Batu Bara diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung Sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung Yang berlaku}} \times 100$$

Indikator kinerja Rasio kepatuhan IMB Kabupaten digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Sasaran Terkendalinya penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.28

## Analisis Capaian Indikator Kinerja Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terkendalinya Penataan Ruang, Infrastruktur Dan Lingkungan	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	Persen	100	100	100

Berdasarkan Laporan Jumlah Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung Terverifikasi Tahun 2025 dari Sekretariat Penyelenggara Bangunan Gedung (PBG) dalam hal ini bidang Cipta Karya, dan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan diketahui bahwa rencana bangunan pada 109 subjek pemohon telah memenuhi syarat regulasi yang berlaku mulai dari tata ruang, desain arsitektur, keamanan, hingga kepatuhan terhadap aturan zonasi. Dengan demikian capaian kinerja indikator rasio kepatuhan IMB kabupaten Batu Bara ini sesuai target yang direncanakan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dan capaian ini tetap konsisten dari tahun sebelumnya. Dan diharapkan capaian ini juga dapat dipertahankan sesuai dengan target Renstra pada tahun 2029 yaitu 100%.

Capaian kinerja ini dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya alokasi anggaran kegiatan dan adanya petugas pelayanan dikantor maupun personil yang bertugas di lapangan. Keberhasilan pencapaian kinerja rasio kepatuhan IMB kabupaten tidak terlepas karena dengan adanya alokasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan apaun itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.29

## Program dan Kegiatan Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Penataan	11.938.894	11.464.600	96,03	Meningkatnya Kualitas



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bangunan Gedung				Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten Rasio 100%
1.	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11.938.894	11.464.600	96,03	Terlaksananya Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung 108 Dokumen
1)	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11.835.694	11.392.000	96,25	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota 18 Dokumen
2)	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	103.200	72.600	70,35	Terlaksananya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Bangunan Gedung melalui SIMBG				Bangunan Gedung melalui SIMBG 109 Dokumen
II.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	154.531	147.83	95,67	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang 100%
1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	149.740	143.057	95,54	Terlaksananya dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan 1 Dokumen
1)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	18.900	18.890	99,94	Terlaksananya Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen
2)	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	130.840	124.167	94,90	Terlaksananya Persyaratan Untuk Mendapatkan Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi 1 Dokumen
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4.790	4.779	99,76	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten 1 Kegiatan
1)	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	4.790	4.779	99,76	Terlaksananya dokumen koordinasi pelaksanaan penataan



No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Kinerja
			(Rp Ribu)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					ruang 1 Dokumen
III.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	380.000	269.559	70,94	Meningkatnya Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata 100%
	Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	380.000	269.559	70,94	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Wilayah Kabupaten 1 Kawasan
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	380.000	269.559	70,94	Terlaksananya Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen
	Jumlah	12.473.426	11.881.996	95,26	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja rasio kepatuhan IMB Kabupaten terhadap realisasi anggaran program dan kegiatannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.30

Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terkendalnya penataan ruang, infrastruktur dan lingkungan	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100	100	100	12.473.426	11.881.996	95,26	<b>0,99</b>

## 7. Nilai evaluasi AKIP

Indikator Kinerja Utama Nilai evaluasi AKIP digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.31

### Analisis Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi AKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	76.00 (BB)	76.00 (BB)	100

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 bahwa Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan kategori BB (baik sekali) dengan nilai sebesar 76,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara masih menunjukkan kategori baik sekali (BB), tapi dengan peningkatan nilai sebesar 3 point.

Kemudian jika realisasi tersebut dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka capaian indikator Nilai Evaluasi AKIP tahun 2025 adalah sebesar 100% atau sesuai target dan realisasi itu juga telah mencapai target Renstra 2025-2029 pada tahun 2029.

Berikut perbandingan perolehan Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara beberapa tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32  
Nilai Evaluasi AKIP Dinas PUTR Tahun 2022-2025

No	Kriteria	Nilai Maksimal	Nilai Evaluasi Akip			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,03	25,1	24,3	24,3
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,11	21,8	22,3	22,7
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,26	9,8	10,7	11
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,50	16,0	15,7	18
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	70,90	72,70	73,00	76,00

Sumber Data: Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP didukung dengan adanya alokasi anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.33  
Program dan Kegiatan Indikator Nilai Evaluasi AKIP

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	12.662.266	12.176.025	96,16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	n Daerah				Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah, AKIP BB (76,00)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.951	4.478	64,42	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah 6 Dokumen
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.479	4.478	99,96	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.471	0,00	-	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokumen
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.687.437	4.519.336	96,41	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 Bulan
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.687.437	4.519.336	96,41	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN 480 Orang/Bulan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	351.338	295.680	84,16	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12 Bulan
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	280.000	276.680	98,81	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 135 Orang
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	71.338	19.000	26,63	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	940.810	918.417.405	97,62	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Bulan
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.934	1.932	99,92	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 12 paket
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.572	150.541	98,67	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 12 paket
3)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.215	5.212	99,94	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebanyak 12 paket
4)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.448	36.342	64,38	Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 12 paket
5)	Penyediaan	15.877	15.874	99,98	Tersedianya



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Barang Cetak dan Penggandaan				Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 12 paket
6)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	204.000	204.0000	100,00	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 12 Dokumen
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.762	504.513	99,95	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.940	541.441	83,95	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 28 Unit
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.200	67.099	99,85	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan 1 Unit
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	577.740	474.342	82,10	Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya 27 Unit
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.680.270	2.617.411	97,65	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000	5.000	100,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Surat Menyurat 12 Laporan
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.360	168.231	86,11	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, Listrik, Dan Internet 12 Laporan
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.479.910	2.444.180	98,56	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.350.519	3.279.260	97,87	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 bulan
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.420	39.590	97,95	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.400	72.959	95,50	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 Unit



NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp RIBU)	REALISASI		KINERJA
			(Rp RIBU)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.128.194	3.063.243	97,92	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 20 Unit
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.400	18.986	97,87	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 30 Unit
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.105	84.480	98,11	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya 1 Unit
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.662.266</b>	<b>12.176.025</b>	<b>96,16</b>	

Berdasarkan uraian diatas dapat dihitung analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP terhadap realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.34

Analisis Efisiensi Sumber Daya Indikator Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari  
Inspektorat Kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP dari	76,00	76,00	100	12.662. 266	12.176. 025	96,16	<b>0,99</b>



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyelenggaraan PUPR	Inspektorat Kabupaten							

Kemudian dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran ini pada masa mendatang, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara perlu melakukan peningkatan cara penyajian laporan kinerja dengan sebaik mungkin mengikuti arahan atau rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara sesuai kaidah penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Adapun beberapa rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Batu Bara atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mempublikasi Renstra, Renja dan dokumen perencanaan lainnya pada website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Membuat crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi OPD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
3. Menyusun perubahan rencana aksi, jika terjadi perubahan anggaran maupun perubahan perjanjian kinerja;
4. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja;
5. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja;
6. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai bagian dari pengambilan keputusan pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
7. Mempublikasikan dokumen kinerja pada website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional maupun level sejenis;

9. Mencantumkan hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja pada laporan kinerja;
10. Memberikan informasi secara terperinci terhadap efisiensi atas penggunaan sumber daya per indikator kinerja;
11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE tahun sebelumnya dan mendokumentasikan hasil tindak lanjut, kemudian menyerahkan ke Inspektorat Daerah sebagai evaluator dan pemberi rekomendasi tindak lanjut.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan pencapaian target-target kinerja sarannya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara mengalokasikan anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp85.915.375.404,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp82.735.811.678,- atau sebesar 96,30%.

Adapun rincian realisasi anggaran masing-masing program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.35

Realisasi Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Realisasi Rp Ribu)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	54.040.696	52.012.999	96,25
2.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	489.922	477.734	97,51



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Realisasi Rp Ribu)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten				
	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.600	9.600	100
3.	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.134.419	5.102.383	99,38
4.	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.105.043	1.075.071	97,29
5.	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	154.531	147.836	95,67
		Program Penataan Bangunan Gedung	11.938.894	11.464.600	96,03
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	380.000	269.559	70,94
6.	Nilai Evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.662.266	12.176.025	96,16

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2025 ini menggambarkan pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara yang diperjanjikan dengan Bupati Batu Bara dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara. Yang mana didalamnya memuat analisis capaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja sasarnya.

Berdasarkan analisis pencapaian kinerja diatas diperoleh bahwa rata-rata capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi anggarannya sebesar 96,30% dari total pagu anggaran Perangkat Daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara tahun 2025 memiliki pengaruh terhadap pencapaian kerjanya.

Dalam upaya pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 di atas tentunya tidak terlepas dari kendala atau permasalahan. Kendala atau permasalahan tersebut meski telah diupayakan langkah-langkah antisipasinya, namun belum seluruhnya dapat diatasi, akan tetapi selanjutnya dijadikan



pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Gambus Laut, 26 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan  
Tata Ruang Kabupaten Batu Bara

**RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T, M. SI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19791213 200804 1001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN BATU BARA**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T., M.Si.**  
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M. Si**  
Jabatan : **BUPATI BATU BARA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lima Puluh, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
**BUPATI BATU BARA**



**H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M. Si**

Pihak Pertama,  
**Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN BATU BARA**

**RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T., M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19791213 200804 1001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**  
**KABUPATEN BATU BARA**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Jalan Yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	60
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten	Persen	91,44
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui SPALD Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten	Persen	88,74
3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	72,05
4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	92,70
5	Terkendalinya Penataan Ruang, Infrastruktur dan Lingkungan	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Persen	100
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB (76,00)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.662.266.609	PAPBD
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.134.419.579	PAPBD
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	489.922.910	PAPBD
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.600.000	PAPBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.105.043.460	PAPBD
6	Program Penataan Bangunan Gedung	11.938.894.764	PAPBD
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	380.000.000	PAPBD
8	Program Penyelenggaraan Jalan	54.040.696.838	PAPBD
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	154.531.244	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>85.915.375.404</b>	

Lima Puluh, 31 Oktober 2025



Pihak Kedua,  
**BUPATI BATU BARA**

**H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M. Si**

Pihak Pertama,  
**Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN TATA RUANG  
KABUPATEN BATU BARA**



**RUBI ANTO SARI SIBORO, S.T., M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19791213 200804 1001